

LAMPIRAN I XXXVI  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2021  
 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,  
 SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN ...

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah / Berkurang		DASAR HUKUM
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
4.x.xx	Pendapatan					
4.x.xx	Pendapatan Asli Daerah					
4.x.xx	Pajak Daerah					
4.x.xx	Retribusi Daerah					
4.x.xx	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
4.x.xx	Lain-lain PAD Yang Sah					
4.x.xx	Pendapatan Transfer					
4.x.xx	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
4.x.xx	Pendapatan Transfer Antar Daerah					
4.x.xx	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah					
4.x.xx	Pendapatan Hibah					
4.x.xx	Dana Darurat					
4.x.xx	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					

KABO HUKUM	PEMANGKAT DAERAH PERAKYARA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BELANJA DAERAH

Urusan Pemerintahan	: x							
Bidang Urusan	: x.xx.xx							
Organisasi	: x.xx.xx							
Unit Organisasi	: x.xx.xx							
Program	: x.xx.xx							
Indikator Hasil	: .....							
Kegiatan..1)	: x.xx.xx							
Indikator Keluaran	: .....							
Sub Kegiatan ...1)	: x.xx.xx							
Indikator Keluaran	: .....							
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah / Berkurang		DASAR HUKUM		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%			
5.x.xx	Belanja							
5.x.xx	Belanja Operasi							
5.x.xx	Belanja Pegawai							
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa							
5.x.xx	Belanja Bunga							
5.x.xx	Belanja Subsidi							
5.x.xx	Belanja Hibah							
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial							
5.x.xx	Belanja Modal							
5.x.xx	Belanja Modal Tanah							
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung							

KABO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
P	1	1	

5.x.xxx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi							
5.x.xxx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya							
5.x.xxx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud							
5.x.xxx	Belanja Tidak Terduga							
5.x.xxx	Belanja Tidak Terduga							
5.x.xxx	Belanja Transfer							
5.x.xxx	Belanja Bagi Hasil							
5.x.xxx	Belanja Bantuan Keuangan							
Sub Kegiatan ...2)		: x.xx.xx						
Indikator Keluaran		: .....						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Ber tambah / Berkurang		DASAR HUKUM		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%			
		5.x.xx	Belanja					
		5.x.xx	Belanja Operasi					
		5.x.xx	Belanja Pegawai					
		5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa					
		5.x.xx	Belanja Bunga					
		5.x.xx	Belanja Subsidi					
		5.x.xx	Belanja Hibah					
		5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial					
5.x.xx	Belanja Modal							
5.x.xx	Belanja Modal Tanah							
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							

KABO	PERANGKAT DAERAH	ASISTEN I	SEKDA
HUKUM	PERARAKASA		
P	L	L	

5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung						
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi						
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya						
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud						
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga						
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga						
5.x.xx	Belanja Transfer						
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil						
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan						
Kegiatan...2)	: x.xx.xx						
Indikator Keluaran	: .....						
Sub Kegiatan...1)	: x.xx.xx						
Indikator Keluaran	: .....						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Bertambah / Berkurang		DASAR HUKUM	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%		
5.x.xx	Belanja						
5.x.xx	Belanja Operasi						
5.x.xx	Belanja Pegawai						
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa						
5.x.xx	Belanja Bunga						
5.x.xx	Belanja Subsidi						
5.x.xx	Belanja Hibah						
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial						

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	

5.x.xx	Belanja Modal								
5.x.xx	Belanja Modal Tanah								
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung								
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi								
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya								
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud								
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga								
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga								
5.x.xx	Belanja Transfer								
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil								
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan								
Sub Kegiatan..2)		: x.xx.xx							
Indikator Keluaran		:.....							
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		Berimbangan / Berkurang		DASAR HUKUM			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%				
5.x.xx	Belanja								
5.x.xx	Belanja Operasi								
5.x.xx	Belanja Pegawai								
5.x.xx	Belanja Barang dan Jasa								
5.x.xx	Belanja Bunga								
5.x.xx	Belanja Subsidi								
5.x.xx	Belanja Hibah								
5.x.xx	Belanja Bantuan Sosial								

KARO HUKUM	PRANGKAT DAERAH PERAKARASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>L</i>	<i>2</i>	

5.x.xx	Belanja Modal								
5.x.xx	Belanja Modal Tanah								
5.x.xx	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
5.x.xx	Belanja Modal Bangunan dan Gedung								
5.x.xx	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan irigasi								
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya								
5.x.xx	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud								
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga								
5.x.xx	Belanja Tidak Terduga								
5.x.xx	Belanja Transfer								
5.x.xx	Belanja Bagi Hasil								
5.x.xx	Belanja Bantuan Keuangan								

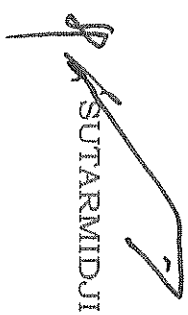
....., tanggal.....

Gubernur Kalimantan Barat



Nama

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

LAMPIRAN L XXXVII  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : TAHUN 2021  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
Ilustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah

Buku Jurnal

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
BUKU JURNAL

SKPD : .....

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Nama Rekening	Debit	Kredit

Buku Besar

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
BUKU BESAR

SKPD : .....  
KODE REKENING : .....  
NAMA REKENING : .....  
PAGU APBD \*) : .....

Tanggal	Uraian	Ref	Debit	Kredit	Saldo

\*) : Untuk akun-akun komponen LRA

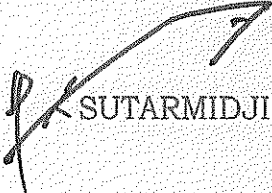
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN L XXXVIII  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR :       TAHUN 2021  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
Kertas Kerja Konsolidasi

Kode Rekening	Nama Rekening	Neraca Saldo SKPDA		Neraca Saldo SKPDB		Neraca Saldo SKPD dst		Neraca Saldo SKPKD		Jurnal eliminasi		Neraca Saldo Pemda	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI



LAMPIRAN L XXXIX  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : TAHUN 2021  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

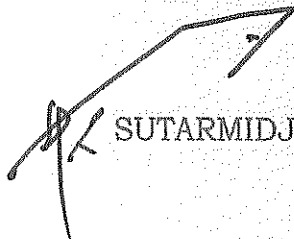
Neraca Saldo

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
NERACA SALDO per Tanggal .....

SKPD : .....

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah	
		Debit	Kredit

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



SUTARMIDJI

LAMPIRAN L XXXX  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2021  
 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Laporan Keuangan SKPD di Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI .....  
 SKPD \_\_\_\_\_

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)				
Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah*				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
<b>JUMLAH PENDAPATAN (7)</b>				
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Jumlah Belanja Operasi				
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
<b>JUMLAH BELANJA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>				

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

PEMERINTAH PROVINSI .....

SKPD \_\_\_\_\_

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah*				
Pendapatan Retribusi Daerah				
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>BEBAN</b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
<b>Jumlah Beban Operasi</b>				
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>				
<b>JUMLAH BEBAN</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>				

KARO HUKUM	PERANGKAT BARRAN PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>IP</i>	<i>h</i>	<i>N</i>	

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
 SKPD .....  
 NERACA  
 PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Piutang Pajak*		
Piutang Retribusi		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Jumlah Aset Lancar		
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain - lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah Aset Lainnya		
<b>JUMLAH ASET</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Surplus/Defisit-LO		
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
SKPD .....  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

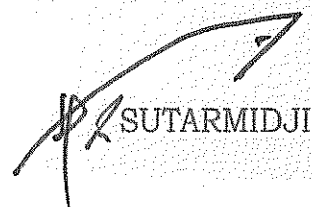
(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
SKPD .....  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1	Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
3.1.1	Pendapatan - LRA
3.1.2	Belanja
3.1.3	Pendapatan - LO
3.1.4	Beban
3.1.5	Aset
3.1.6	Kewajiban
3.1.7	Ekuitas Dana
3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V	Penutup

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

  
SUTARMIDJI

LAMPIRAN L XXXXI  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2021

TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 Laporan Keuangan SKPKD di Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI .....

SKPKD .....

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian	(Dalam Rupiah)			
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi				
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalar, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
Jumlah Belanja Modal				
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga				

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

<b>BELANJA TRANSFER</b>			
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa			
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota			
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota			
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>			
<b>JUMLAH BELANJA</b>			
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>			
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
Penggunaan SILPA			
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Perjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
Penerimaan Pembiayaan Lainnya			
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>			
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain			
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank			
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)			
Pemberian Pinjaman Daerah			
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>			
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

PEMERINTAH PROVINSI .....  
SKPKD .....  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

( Dalam Rupiah )

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>				
Bantuan Keuangan				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>				
<b>Total Pendapatan Transfer</b>				
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
<b>Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>BEBAN</b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
<b>Jumlah Beban Operasi</b>				
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>				
<b>BEBAN TRANSFER</b>				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
<b>Jumlah Beban Transfer</b>				

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	/	N	



BEBAN TAK TERDUGA				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
<b>JUMLAH BEBAN</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>				
<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>				

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	R	N	

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
 SKPKD .....  
 NERACA  
 PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
Aset Untuk Dikonsolidasikan		
Jumlah Aset Lancar		
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
Jumlah Investasi Non Permanen		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
Jumlah Investasi Permanen		
Jumlah Investasi Jangka Panjang		
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengejaan		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Aset Tetap		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>K</i>	<i>W</i>	

<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan		
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Jangka Panjang		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Ganti Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain - lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		
<b>JUMLAH ASET</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang kepada Pemerintah Pusat		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)		
Premium (Diskonto) Obligasi		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		
<b>EKUITAS</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Surplus/Defisit-LO		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

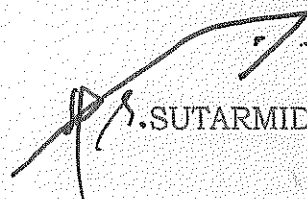
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
 SKPKD .....  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

	(Dalam Rupiah)	
Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
 SKPKD .....  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
	1.3 Sistematisasi penulisan catatan atas laporan keuangan SKPKD
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	3.1.1 Pendapatan - LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pembiayaan
	3.1.4 Pendapatan - LO
	3.1.5 Beban
	3.1.6 Aset
	3.1.7 Kewajiban
	3.1.8 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
BAB V	Penutup

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
S. SUTARMIDJI

LAMPIRAN L XXXXII  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : TAHUN 2021  
 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI .....  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian	(Dalam Rupiah)			
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
Cana Bagi Hasil				
Cana Alokasi Umum				
Cana Alokasi Khusus - Fisik				
Cana Alokasi Khusus - Non Fisik				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Cana Insentif Daerah				
Cana Otonomi Khusus				
Cana Keistimewaan				
Cana Desa				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>				
Bantuan Keuangan				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>				
<b>Total Pendapatan Transfer</b>				
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya				
<b>Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>BELANJA</b>				
<b>BELANJA OPERASI</b>				
Belanja Pegawai				
Belanja Barang dan Jasa				
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>				
<b>BELANJA MODAL</b>				
Belanja Modal Tanah				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Jaringan				
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Belanja Modal Aset Lainnya				
<b>Jumlah Belanja Modal</b>				
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>				
Belanja Tak Terduga				
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>				

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	
<i>SP</i>	<i>h</i>	<i>M</i>	

<b>BELANJA TRANSFER</b>			
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa			
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota			
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa			
Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Kepada Kabupaten/Kota			
<b>Jumlah Belanja Transfer</b>			
<b>JUMLAH BELANJA</b>			
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>			
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
Penggunaan S/LPA			
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Oligasi Daerah)			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
Penerimaan Pembiayaan Lainnya			
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>			
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat			
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain			
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank			
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Oligasi Daerah)			
Pemberian Pinjaman Daerah			
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>			
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKRETARIS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

PEMERINTAH PROVINSI .....  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

[Dalam Rupiah]

Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
Perdapatn Pajak Daerah				
Perdapatn Retribusi Daerah				
Perdapatn Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>				
Dana Bagi Hasil				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus - Fisik				
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>				
Dana Insentif Daerah				
Dana Otonom Khusus				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnya</b>				
<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>				
Bantuan Keuangan				
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>				
<b>Total Pendapatan Transfer</b>				
<b>LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>				
Perdapatn Hibah				
Perdapatn Dana Darurat				
Perdapatn Lainnya				
<b>Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>BEBAN</b>				
<b>BEBAN OPERASI</b>				
Beban Pegawai				
Beban Barang dan Jasa				
Beban Bunga				
Beban Subsidi				
Beban Hibah				
Beban Bantuan Sosial				
<b>Jumlah Beban Operasi</b>				
<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>				
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin				
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan				
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Beban Penyusutan Aset Lainnya				
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud				
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>				

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

<b>BEBAN TRANSFER</b>				
Beban Bagi Hasil				
Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah Beban Transfer				
<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>				
Beban Tak Terduga				
Jumlah Beban Tak Terduga				
<b>JUMLAH BEBAN</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>				
<b><u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u></b>				
<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Surplus Non Operasional				
<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Jumlah Defisit Non Operasional				
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>				
<b><u>POS LUAR BIASA</u></b>				
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>				
Pendapatan Luar Biasa				
Jumlah Pendapatan Luar Biasa				
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>				
Beban Luar Biasa				
Jumlah Beban Luar Biasa				
<b>POS LUAR BIASA</b>				
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>				

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>IP</i>	<i>A</i>	<i>W</i>	



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kaptasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang		
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
Investasi Non Permanen		
Investasi kepada BUMN		
Investasi kepada BUMD		
Investasi dalam Obligasi		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Dana Bergulir		
<b>Jumlah Investasi Non Permanen</b>		
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah		
<b>Jumlah Investasi Permanen</b>		
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cadangan			
<b>Jumlah Dana Cadangan</b>			
<b>ASET LAINNYA</b>			
lagihan Jangka Panjang			
Tagihan Penjualan Angsuran			
Tuntutan Ganti Rugi			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
Aset Tak Berwujud			
Aset Lain - lain			
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>			
<b>JUMLAH ASET</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PHK)			
Utang Bunga			
Utang Pinjaman Jangka Pendek			
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			
Pendapatan Diterima Dimuka			
Utang Belanja			
Utang Jangka Pendek Lainnya			
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Utang kepada Pemerintah Pusat			
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank			
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank			
Utang kepada Masyarakat (Obligasi)			
Premium (Diskonto) Obligasi			
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>			
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>			
<b>EKUITAS</b>			
<b>EKUITAS</b>			
<b>JUMLAH EKUITAS</b>			
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKAHARA	ASISTEN I	SEKDA
<i>IP</i>	<i>A</i>	<i>P</i>	

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

	(Dalam Rupiah)	
Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal		
Surplus/Defisit LO		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Lain - lain		
Ekuitas Akhir		

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
 PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

	(Dalam Rupiah)	
Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		
<b>Subtotal</b>		
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)		
<b>Subtotal</b>		
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-lain		
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAIRYAH PEMERINTAHAN	ASISTEN I	SEKDA
JP	h	h	

PEMERINTAH PROVINSI .....  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**  
**METODE LANGSUNG**

	(Dalam Rupiah)	
Uraian	20X1	20X0
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI</b>		
<b>ARUS MASUK KAS</b>		
Penerimaan Pajak Daerah		
Penerimaan Retribusi Daerah		
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		
Penerimaan Dana Bagi Hasil		
Penerimaan Dana Alokasi Umum		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		
Penerimaan Dana Insentif Daerah		
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		
Penerimaan Dana Keistimewaan		
Penerimaan Dana Desa		
Penerimaan Bantuan Keuangan		
Penerimaan Hibah		
Penerimaan Dana Darurat		
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		
<b>ARUS KELUAR KAS</b>		
Pembayaran Pegawai		
Pembayaran Barang dan Jasa		
Pembayaran Bunga		
Pembayaran Subsidi		
Pembayaran Belanja Hibah		
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
Pembayaran Tak Terduga		
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota		
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		
Pembayaran Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus ke Kabupaten/Kota		
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		
<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi</b>		
<b>ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI</b>		
<b>ARUS MASUK KAS</b>		
Pencairan Dana Cadangan		
Penjualar atas Tanah		
Penjualar atas Peralatan dan Mesin		
Penjualar atas Gedung dan Bangunan		
Penjualar atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Penjualar Aset Tetap Lainnya		
Penjualar Aset Lainnya		
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEK
P	L	K	

**ARUS KELUAR KAS**

- Pembentukan Dana Cadangan
- Perolehan Tanah
- Perolehan Peralatan dan Mesin
- Perolehan Gedung dan Bangunan
- Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- Perolehan Aset Tetap Lainnya
- Perolehan Aset Lainnya
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
- Jumlah Arus Keluar Kas
- Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

**ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN**

**ARUS MASUK KAS**

- Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
- Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
- Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
- Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Jumlah Arus Masuk Kas

**ARUS KELUAR KAS**

- Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
- Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
- Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
- Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Jumlah Arus Keluar Kas
- Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

**ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS**

**ARUS MASUK KAS**

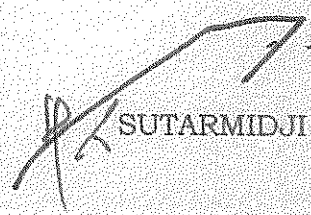
- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Jumlah Arus Masuk Kas

**ARUS KELUAR KAS**

- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Jumlah Arus Keluar Kas
- Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

- Kenaikan/ Penurunan Kas
- Saldo Awal Kas
- Saldo Akhir Kas


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 4



SUTARMIDJI